

Tinjauan Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Asuransi Jiwasraya di Kota Palopo

Tajuddin¹
Suhardi M Anwar²
Sitti Hadijah³

No. HP 085255596199¹, 081343513111²

¹Alamat Korespondensi:

Email:

Abstrak

GCG adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (GCG) terhadap praktik pelaksanaan di perusahaan. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di dalamnya terdapat prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, analisis dokumen-dokumen perusahaan, dan kuesioner. Data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode fenomenologi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional. Motivasi yang mendorong perusahaan untuk menjalankan GCG adalah sebagai upaya peningkatan nilai perusahaan dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan ini juga tentu dapat meningkatkan nilai kompetitif perusahaan dimata pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Kesimpulan penelitian ini adalah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menerapkan prinsip-prinsip dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Pendahuluan

Seiring dengan berjalannya waktu, istilah *Good Corporate Governance* kian populer. Tak hanya populer, tetapi istilah tersebut di tempatkan di posisi terhormat. Isu *Corporate Governance* yang tadinya hanya bersifat marjinal, dipandang sebelah mata kini telah menjadi isu penting.

Hal itu setidaknya terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua, krisis ekonomi dunia, di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan GCG, diantaranya adalah Sistem *Regulatory* yang tidak baik, Standar Akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Survei yang dilakukan oleh McKinsey dan Co (2002) dalam Ardianingsih (2012) menunjukkan bahwa *corporate governance* menjadi perhatian utama para investor, menyamai kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging markets*). Hasil analisis Hoesada (2002) dalam Ardianingsih (2012) menyatakan bahwa masalah-masalah kebangkrutan perusahaan erat kaitannya dengan masalah degradasi moral dikalangan pelaku bisnis,

masih lemahnya atau tidak adanya sistem *corporate governance* yang baik serta masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan kepada publik.

Belum diterapkannya mekanisme GCG yang baik pada perusahaan, ini dapat menjadi penyebab perusahaan atau pihak manajemen untuk memberikan informasi-informasi yang memberi dampak positif terhadap harga saham dan dapat mendorong perusahaan untuk cenderung melakukan manipulasi akuntansi dengan menyajikan informasi tertentu untuk menghindari terpuruknya harga saham (Susiana dan Herawaty, 2007). Tetapi hal tersebut menyebabkan masyarakat sebagai pengguna data akuntansi atau laporan keuangan merasa dirugikan, karena mereka tidak memberikan informasi dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.

GCG mendapatkan perhatian luas setelah terjadinya berbagai krisis seperti krisis ekonomi dan moneter di Indonesia tahun 1997-1998 yang berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan. Krisis tersebut antara lain terjadi karena banyak perusahaan yang belum menerapkan GCG secara konsisten, khususnya belum diterapkannya etika bisnis. Oleh karena itu etika bisnis dan pedoman perilaku menjadi hal yang sangat penting.

Begitu pula peristiwa Worldcom dan Enron di Amerika Serikat telah menambah keyakinan betapa pentingnya penerapan GCG, di Amerika Serikat, peristiwa tersebut ditanggapi dengan perubahan fundamental peraturan perundang-undangan di bidang audit dan pasar modal. Di negara-negara lain, hal tersebut ditanggapi secara berbeda, antara lain dalam

bentuk penyempurnaan pedoman GCG di negara yang bersangkutan.

Penerapan GCG dirasa mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi tindakan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan. *Cadbury Report* (UK) dan *Treadway Report* (US) secara mendasar menyebutkan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik di Amerika dan Eropa dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktik curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh *corporate boards*. Keterlibatan CEO, komisaris, komite audit, internal auditor, sampai kepada eksternal auditor, cukup membuktikan bahwa kecurangan banyak dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan.

Tuntutan terhadap penerapan GCG secara konsisten dan komprehensif mulai datang secara beruntun, mereka yang menyuarakan hal itu di antaranya adalah berbagai lembaga investasi baik domestik maupun mancanegara, termasuk institusi seperti *World Bank*, IMF, OECD, dan APEC. Dengan melontarkan beberapa prinsip umum dalam *Corporate Governance* seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, *stakeholder concern*, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju ke arah yang lebih sehat, maju, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta profesional. Tujuan akhirnya adalah daya saing yang tangguh, yang diikuti pulihnya kepercayaan investor.

Metode Penelitian

penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya yang beralamat di Jl. Andi Kasim No. 23 Kota Palopo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu penelitian yang melibatkan analisis data/informasi yang bersifat deskriptif dan belum dapat dikuantifikasi, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video dan lain-lain. Penelitian kualitatif menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti (Sekaran, 2006:242), dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak PT. Asuransi Jiwasraya, maupun dengan pemberian kuesioner kepada para staf karyawan perusahaan. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi entah di dalam atau luar organisasi (Sekaran, 2006:245).

Untuk memperoleh data sebagai penunjang dalam penulisan penelitian ini maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui wawancara dan kuesioner. Serta penelitian kepustakaan.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan penelusuran informasi data/ dokumen melalui interview secara mendalam mengenai pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Asuransi Jiwasraya Kota Palopo, dengan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif berasal dari filsafat Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Secara umum pendekatan interpretif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi (Neuman dalam Triyuwono, 2013).

Jadi fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka. Manusia secara terus menerus menciptakan realitas sosial mereka dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu terbentuk (Ghozali dalam Diah Febriyanti, 2010).

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah fenomenologi. Menurut Dimiyati, fenomenologi adalah suatu metode yang secara sistematis berpangkal pada pengalaman dan melakukan pengolahan-pengolahan pengertian (Basrowi dan Sukidin, 2002:38). Menurut Orlens, fenomenologi adalah instrumen untuk memahami lebih jauh hubungan antara kesadaran individu dan

kehidupan sosialnya (Basrowi dan Sukidin, 2002:38). Fenomenologi berupaya mengungkapkan bagaimana aksi sosial, situasi, dan masyarakat sebagai produk kesadaran manusia. Manusia adalah makhluk yang melakukan komunikasi, interaksi, partisipasi, dan penyebab yang bertujuan. Kekhususan manusia terletak pada internasionalitas psikisnya yang ia sadari, yang dikaitkan dengan dunia arti dan makna. Dunia makna manusia dapat diteliti dengan metode fenomenologi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan

Hasil wawancara dan data yang diperoleh penulis, dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan, peningkatan nilai perusahaan dan pemenuhan kewajiban perusahaan kepada *stakeholdersnya*, maka seluruh manajemen dan karyawan menyadari bahwa nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh para pendahulu dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) harus secara utuh dan berkesinambungan diterapkan dalam pelaksanaan perusahaan. Keseriusan komitmen dan kesungguhan penerapan tata kelola yang baik pula yang telah mengokohkan fondasi bisnis perusahaan hingga tetap eksis selama 154 tahun.

Asuransi Jiwasraya telah berperan dalam memberikan perlindungan jiwa dan keuangan bagi para nasabahnya. Jiwasraya telah mampu bertahan dan terus berubah untuk menjadi lebih baik di tengah-tengah persaingan industri asuransi melewati 3 (tiga) kali tahun keemasan. Semua yang telah dilalui ini tidak terlepas dari komitmen perusahaan yang telah menerapkan GCG secara

konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional, sebagaimana telah diamanatkan oleh kementerian BUMN dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada BUMN.

Wawancara dengan Bapak Muh. Ansar selaku staff junior di bagian administrasi dan logistik, beliau mengatakan awal dimulainya penerapan prinsip GCG pada PT. Asuransi Jiwasraya adalah:

...Landasan atas komitmen tata kelola perusahaan telah dimulai sejak tahun 2001. Prosesnya diawali dengan sosialisasi GCG yang bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan komprehensif mengenai GCG dilanjutkan fase transformasi, pemetaan, sosialisasi, implementasi serta evaluasi. Selanjutnya dalam proses implementasinya, perusahaan juga secara terus menerus melakukan penyempurnaan untuk pengoptimalan penyelenggaraan tata kelolanya dimasa yang akan datang....

Hasil wawancara dengan Ibu Wiwik selaku staff senior administrasi dan logistik PT. Asuransi Jiwasraya Palopo, beliau mengatakan motivasi yang mendorong Asuransi Jiwasraya melakukan praktik GCG adalah:

.....Sebagai upaya peningkatan nilai perusahaan dan menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan ini juga tentu dapat meningkatkan nilai kompetitif perusahaan dimata pemegang saham dan pemangku kepentingan...

Dalam dokumen PT. Asuransi Jiwasraya, visi dan misi perusahaan dinyatakan sebagai berikut :

Visi:

Menjadi perusahaan yang terpercaya dan dipilih untuk memberikan solusi bagi kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan.

Misi:

- Selalu memberikan rasa aman, kepastian dan kenyamanan melalui solusi inovatif dan kompetitif bagi pelanggan atas kebutuhan asuransi dan perencanaan keuangan.
- Menciptakan nilai Pemegang Saham (*shareholder value creation*) yang atraktif melalui pengelolaan operasional dan investasi perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- Menjadi tempat pilihan untuk tumbuh dan berkembangnya karyawan menjadi profesional yang memiliki integritas dan kompetensi di bidang asuransi dan perencanaan keuangan.
- Berkomitmen mengembangkan agen yang memiliki dedikasi, kemampuan dan integritas sehingga perusahaan menjadi tempat pilihan bagi agen yang ingin berkarier serta memiliki penghasilan tinggi.
- Berpartisipasi mewujudkan peningkatan kesejahteraan melalui kontribusi dalam proses pembangunan masyarakat.
- Membangun kemitraan yang saling menguntungkan serta menciptakan sinergi bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
- Meningkatkan penetrasi pasar dan kualitas pelayanan kepada pelanggan secara lebih efisien dan efektif melalui *multiple distribution channel* seperti *bancassurance*, *direct marketing* dan *financial planning*.

- Melakukan kerjasama dengan pemasok sesuai prinsip keterbukaan, *fairness*, saling menguntungkan dan berkembang sebagai *'partner in progres'*.
- Mewujudkan praktek pengelolaan bisnis asuransi dan perencanaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menjaga kemitraan dengan penagih yang memiliki integritas dan kompetensi dalam penagihan premi.

Penulis menarik kesimpulan PT. Asuransi Jiwasraya juga memberikan perhatian kepada seluruh pihak yang berkepentingan, artinya dalam menjalankan kegiatannya PT. Asuransi Jiwasraya tidak sekedar peduli pada pemegang saham tetapi juga pada semua pihak yang berkepentingan.

Data yang diperoleh penulis yaitu penerapan prinsip-prinsip tata kelola Asuransi Jiwasraya diwujudkan dengan 10 poin implementasi tata kelola perusahaan. 10 poin tersebut diantaranya adalah:

1. Membayar deviden tahunan kepada Pemegang Saham.
2. Memberikan bonus kepada karyawan.
3. Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa untuk setiap kali pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
4. Rapat antar Komisaris dan Direksi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali, atau lebih yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
5. Memberlakukan ketentuan underwriting dalam setiap proses pengakseptasian risiko.

6. Memenuhi ketentuan minimal tingkat kesehatan perusahaan (RBC).
7. Melakukan pengalihan risiko kepada perusahaan Reasuransi.
8. Memiliki *Standard Operating Procedure* yang jelas untuk semua unit kerja.
9. Menyampaikan segala informasi perusahaan terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan dapat di akses melalui web site.
10. Adanya program pengalihan Penagih menjadi Unit Manager.

Peranan *Corporate* dalam menerapkan GCG disampaikan oleh Bapak Udin selaku staff senior Pertanggung, menyampaikan bahwa:

....Perusahaan telah melengkapi pelaksanaan tata kelola yang baik dengan struktur tata kelola yang baik...

Struktur tata kelola yang baik yang dimaksud adalah:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), dimana Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan dan mempertanggungjawabkan segala tugas dan kewajibannya dalam hal pengawasan, pelaksanaan dan pengelolaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada pemegang saham, diselenggarakan satu kali dalam satu tahun. Disamping RUPS Tahunan, sesuai dengan kebutuhannya PT. Asuransi Jiwasraya

(Persero) dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.

2. Dewan Komisaris

Melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan. Pengawasan dan pemberian nasehat meliputi antara lain: pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar perusahaan, keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau efektifitas praktek GCG perusahaan.

Komposisi Dewan Komisaris ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak memiliki kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain terhadap Direksi. Dewan Komisaris perusahaan saat ini terdiri dari 4 (empat) orang Komisaris yang dipimpin oleh Komisaris Utama yang merangkap sebagai Komisaris Independen, sedangkan 3 (tiga) orang lainnya adalah para profesional dengan latar belakang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Anggota Dewan Komisaris juga telah mengikuti proses penilaian dan kepatutan terhadap kompetensi dan integritasnya oleh Otoritas Pembina dan Pengawas. Dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan

Direksi dalam melaksanakan pengurusan perusahaan serta memberi nasehat kepada Direksi, Dewan Komisaris harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar perusahaan dan keputusan-keputusan RUPS, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
- b. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan itikad baik untuk kepentingan dan usaha perusahaan.
- c. Bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan perusahaan dan bertanggungjawab kepada RUPS.
- d. Dalam melakukan tindakan kepengurusan, bagi Dewan Komisaris berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perusahaan dan pihak ketiga.
- e. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan Direksi yang memintakan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara proaktif yang mencakup semua aspek bisnis perusahaan.

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali, yang terdiri dari :

- a. Rapat intern Dewan Komisaris.
- b. Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi.

c. Rapat antara Dewan Komisaris dengan Komite Audit

3. Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Dalam hal pengurusan perusahaan, Direksi bertindak selaku pimpinan, serta wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan tugasnya tersebut yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

4. Komite-Komite

Komite yang terdapat pada Asuransi Jiwasraya terbagi dua, yaitu:

- a. Komite di bawah dewan komisaris (Komite Audit)

Berdasarkan Keputusan Komisaris PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 01/KEP.DK.0509 tanggal 29 Mei 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya dan *Audit Committee Charter* tanggal 28 Desember 2009, Komite Audit mempunyai tugas :

- 1) Melakukan identifikasi dan evaluasi/pengkajian atas hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris.
- 2) Membantu Dewan Komisaris dalam mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai.
- 3) Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal perusahaan sebagai upaya penyempurnaan, pengendalian dan penciptaan iklim disiplin guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- 4) Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun audit eksternal dengan cara menilai pelaksanaan kegiatan dan hasil audit Divisi Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal, sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan audit yang tidak memenuhi standar.
- 5) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan serta implementasinya.
- 6) Memastikan bahwa prosedur review terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan telah berjalan dengan baik.
- 7) Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas transparansi Laporan Keuangan Tahunan perusahaan.

- 8) Mengevaluasi kecukupan dan ketepatan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh perusahaan serta menilai pelaksanaannya.
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

Adapun peran dan tanggungjawab komite audit yaitu:

- 1) Terkait dengan Laporan Keuangan (*Financial Reporting*).
 - a. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
 - b. Melakukan review atas laporan-laporan keuangan terhadap standar dan kebijakan akuntansi serta konsistensi terhadap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan.
 - c. Melakukan pengawasan atas audit eksternal, termasuk melakukan assessment mengenai kualitas jasa audit yang dilakukan dan merekomendasikan kewajaran fee yang dibebankan oleh auditor eksternal.
- 2) Terkait dengan Manajemen Pengendalian dan Risiko (*Risk and Control Management*).
 - a. Melakukan pengawasan proses manajemen risiko dan evaluasi

- pengendalian perusahaan, guna memperkecil kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang ditimbulkan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua risiko utama dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan secara seksama oleh para auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal.
 - c. Meyakini bahwa jajaran manajemen telah melaksanakan pengendalian risiko-risiko sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, baik auditor internal maupun auditor eksternal.
- 3) Terkait dengan *Good Corporate Governance*.
- a. Memastikan bahwa Direksi telah menetapkan nilai dan sasaran perusahaan dan mensosialisasikannya kepada para *stakeholders*.
 - b. Memastikan terpenuhinya aspek akuntabilitas pada setiap *Business Process* perusahaan.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap proses dan implementasi GCG di perusahaan.
 - d. Memonitor kepatuhan terhadap kebijakan pendukung penerapan GCG (*soft structure Good*

Corporate Governance) perusahaan.

- e. Memonitor kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku bagi perusahaan.
- f. Meminta Auditor Internal melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali mengenai cakupan review terhadap praktik GCG di perusahaan dan memberikan laporan.

5. Komite Investasi

Dasar pembentukan Komite Investasi adalah Keputusan Direksi Nomor: 087.SK.U.0413 tanggal 29 April 2013 tentang Pembentukan Komite Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Tujuan Pembentukan komite investasi adalah untuk lebih mengoptimalkan hasil investasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Investasi yang sehat dan hati-hati serta melibatkan lintas sektoral dalam menetapkan kebijakan Investasi.

Tugas dan Kewajiban Komite Investasi, adalah:

1. Memantau pelaksanaan dan kegiatan investasi berdasarkan batasan-batasan transaksi secara umum dengan tetap mengacu pada pedoman Investasi yang telah ditetapkan.
2. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Investasi oleh Tim Pengelola Investasi (Divisi Investasi) berdasarkan

acuan/pedoman yang telah ditetapkan secara tertulis.

3. Mengadakan pertemuan setiap bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan dan kegiatan investasi yang telah berjalan berdasarkan laporan hasil dan posisi investasi yang dibuat oleh Divisi Investasi serta program-program yang akan dilaksanakan selanjutnya.
4. Melakukan review atas hasil investasi setiap bulan.

6. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

SPI merupakan satuan unit kerja dalam organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang bertugas membantu Direktur Utama dan Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan perusahaan yang sehat, tumbuh dan berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Tugas audit SPI mencakup: pemeriksaan, pengkajian dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan mutu kerja dari pelaksanaan tanggung jawab yang ditetapkan.

Asuransi Jiwasraya senantiasa menekankan pentingnya pelaksanaan GCG secara efektif. Menurut pernyataan ibu Ani dari staff senior MA (Marketing Area):

....Untuk mendukung implementasi tata kelola yang baik, Jiwasraya juga telah menyusun dan memiliki perangkat lunak (*soft structure*) sebagai penyempurnaan prosedur-prosedur GCG...

Kebijakan penyempurna berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG terdiri dari :

1. *Code of Corporate Governance*.
2. *Audit Committe Charter*.
3. *Board Manual*.
4. *Code of Conduct*.

Perusahaan telah memiliki pedoman perilaku untuk memenuhi standar perilaku terhadap semua pegawai sebagai bagian pemenuhan komitmen penerapan GCG perusahaan. Standar perilaku tersebut diharapkan mampu menggerakkan kesadaran seluruh karyawan perusahaan untuk menghindari praktek-praktek penyimpangan norma-norma maupun pelanggaran hukum yang bisa berdampak pada penurunan kinerja dan/atau citra dan reputasi perusahaan. Pedoman perilaku ini juga terus disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang diatur dalam pedoman perilaku menyangkut etika hubungan dengan berbagai pihak yang terkait dengan operasional perusahaan seperti :

- a) Hubungan dengan perusahaan :
 - Ketaatan terhadap hukum.
 - Benturan kepentingan.
 - Kerahasiaan dan pengungkapan informasi.
 - Penyimpangan dan penyalahgunaan aset.
 - Penggunaan teknologi informasi.
 - Kesehatan dan keselamatan kerja.

- Kontribusi dan aktivitas politik.
 - b) Hubungan dengan sesama pegawai.
 - c) Hubungan dengan agen.
 - d) Hubungan dengan penagih.
 - e) Hubungan dengan pelanggan.
 - f) Hubungan dengan pemasok.
 - g) Hubungan dengan mitra bisnis.
 - h) Hubungan dengan pesaing.
 - i) Hubungan dengan pejabat negara.
 - j) Hubungan dengan masyarakat
5. Kebijakan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Suap.
Perusahaan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan praktik pengelolaan perusahaan yang etis, fair dan transparan melalui keputusan Direksi tentang peraturan pemberian dan penerimaan hadiah di lingkungan perusahaan. Melalui surat keputusan ini perusahaan menegaskan sikap dan menetapkan peraturan yang jelas dan tegas terhadap pemberian dan penerimaan hadiah yang meliputi: larangan suap, pemberian donasi dan hadiah, berikut mekanisme pelaporan, pemeriksaan dan sanksi-sanksinya.
6. *Internal Audit Charter*.
Internal Audit Charter mengatur dengan jelas tentang kedudukan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, kewenangan, tanggungjawab profesi, metode kerja dan sistem pelaporan fungsional SPI sebagai pejabat yang independen dan profesional. *Internal Audit Charter* sebagai pedoman yang mendukung fungsi dan misi SPI guna mendorong:
- a) Terciptanya tingkat kehematan sumberdaya manusia yang optimal dan efektivitas hasil yang maksimal (konstruktif).
 - b) Dimanfaatkannya rekomendasi Divisi Satuan Pengawasan Internal sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi (konsultatif).
 - c) Terciptanya ketaatan pada kebijakan, ketentuan dan peraturan yang ditetapkan (protektif).
7. Kebijakan Benturan Kepentingan.
Direksi Perusahaan juga telah menerbitkan keputusan mengenai peraturan penanganan benturan kepentingan yang memuat: jenis (pertimbangan kepegawaian, proses pengadaan barang/jasa serta aktivitas sampingan), pengungkapan dan pelaporan serta sanksi-sanksinya.
8. Kebijakan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan wawancara yang diperoleh peneliti, Asuransi Jiwasraya telah mempublikasikan informasi dengan tujuan untuk menjembatani komunikasi serta membuka akses seluas-luasnya bagi para pemangku kepentingan, perusahaan telah memiliki website perusahaan yakni: <http://www.jiwasraya.co.id> yang dapat dipergunakan untuk mengakses berbagai informasi penting terkait dengan perusahaan: seperti laporan keuangan perusahaan, informasi terkait dengan polis dan informasi lainnya. Melalui website tersebut juga dapat diakses informasi terkait profil perusahaan,

produk dan kinerja Jiwasraya yang terus menerus diperbaharui. Perusahaan juga menggunakan media-media lain untuk penyebaran informasi perusahaan dan produknya seperti : *talk show*, iklan media cetak dan *audio visual*, *billboard*, *wall sign* dan sebagainya. Sedangkan untuk komunikasi dan informasi internal perusahaan, seluruh jajaran insan Jiwasraya bisa mendapatkan informasi perusahaan melalui majalah dinding, dan jaringan situs internal (*corp mail*, HCMIS).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, PT. Asuransi Jiwasraya memiliki Auditor Eksternal yang bertanggung jawab atas opini terhadap pemeriksaan laporan Keuangan dan Laporan Manajemen lainnya yang dipersiapkan Direksi, Auditor Eksternal juga menjadi indikator bagi *stakeholders* dalam menilai kondisi perusahaan. Hubungan perusahaan dengan Auditor Eksternal harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Auditor Eksternal yang ditunjuk harus memiliki integritas dan reputasi yang baik, khusus untuk perusahaan Asuransi yang sahamnya tercatat di bursa, harus menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bapepam.
- b. Penunjukan KAP dilakukan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan atas rekomendasi Komisaris atau Komite Audit setelah melalui seleksi berdasarkan kriteria dan ketentuan perusahaan.
- c. Auditor Eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan lainnya di perusahaan.
- d. Auditor Eksternal harus memiliki akses atas semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan sehingga memungkinkan memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan asuransi dengan standar akuntansi keuangan Indonesia.
- e. Auditor Eksternal tidak diperbolehkan memberikan jasa lain selain jasa audit.

Perusahaan Asuransi Jiwasraya pada tahun 2013 telah dilakukan penilaian (*assessment*) penerapan GCG oleh pihak *assessor independent* untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan implementasi prinsip-prinsip GCG telah dijalankan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan metodologi *assessment* yang mengacu pada Kerangka Acuan Pelaksanaan *Assessment* dan Penerapan *Good Corporate Governance* di BUMN dengan parameter baru sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S/MBU/2012. Hasil *assesment* yang dilakukan oleh pihak Konsultan Independen PT. Titian Usaha Kami pada tahun 2013 selaku *assessor* adalah 87,15 atau mencapai kualifikasi SANGAT BAIK.

Dari hasil wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada

informan, maka penulis memperoleh informasi mengenai prinsip-prinsip GCG yang diterapkan di Asuransi Jiwasraya yang antara lain :

a. Keterbukaan (*Transparency*)

1. Asuransi Jiwasraya mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Asuransi Jiwasraya telah mengembangkan teknologi informasi manajemen untuk menyempurnakan kelengkapan informasi, keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyediaan dan integrasi data untuk kebutuhan bisnis. Penggunaan teknologi *paper less* juga telah mengubah sistem penyajian informasi menjadi lebih komunikatif, efektif dan efisien.
3. Asuransi Jiwasraya telah menerapkan manajemen resiko dalam tingkatan perusahaan untuk meminimalkan berbagai risiko yang dapat mengganggu/mempengaruhi kinerja perusahaan.
4. Asuransi Jiwasraya telah mempublikasikan informasi

keuangan yang diterbitkan dalam *annual report* tahunan.

5. Asuransi Jiwasraya telah mempublikasikan informasi lain yang material.
 6. Asuransi Jiwasraya telah menetapkan tujuan perusahaan dengan jelas.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)
1. Asuransi Jiwasraya sudah ada pembagian tugas (*job description*) yang jelas, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing.
 2. Asuransi Jiwasraya telah menetapkan penilaian kerja, untuk melakukan penilaian secara "*fair*" atas kinerja karyawan, perusahaan menerapkan sistem manajemen kinerja menggunakan *performance management* yang menerapkan penilaian berdasarkan aspek *financial*, proses bisnis, pelayanan pelanggan, kompetensi serta inovasi. *Performance Management* juga digunakan sebagai acuan penegakan disiplin agar tercipta iklim kerja yang sehat dan kondusif sehingga kebijakan *reward* dan *punishment* bisa diterapkan secara adil dan konsisten kepada seluruh karyawan.

3. Asuransi Jiwasraya memiliki komite audit yang langsung dibawahahi oleh dewan komisaris.
 4. Asuransi Jiwasraya telah membentuk auditor internal dan menetapkan kembali peran dan fungsi auditor internal.
 5. Asuransi Jiwasraya menggunakan auditor eksternal yang berkualitas dan menggunakan auditor eksternal yang independen, yaitu auditor eksternal dari KAP yang terdaftar di Bapepam.
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
1. Asuransi Jiwasraya mempertimbangkan tanggungjawab sosial dalam setiap program dan prosedur perusahaan, tidak semata-mata mencari profit.
 2. Asuransi Jiwasraya telah membuat peraturan-peraturan dalam menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dengan membuat pedoman perilaku bagi karyawan. Apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi.
 3. Asuransi Jiwasraya berusaha menciptakan lingkungan bisnis yang baik dan terpercaya.
- d. Kewajaran (*Fairness*)
1. Asuransi Jiwasraya telah membuat kebijakan untuk memproteksi perusahaan dari kesalahan-kesalahan yang biasa timbul dari dalam perusahaan.
2. Setiap informasi sudah diungkapkan dan dipublikasikan secara wajar kepada stakehoders. Informasi tersebut dapat diakses di www.jiwasraya.co.id.
- e. Kemandirian (*Independency*)
1. Asuransi Jiwasraya dalam pengambilan keputusan tidak ada pengaruh dan kepentingan dari kelompok atau golongan tertentu.
 2. Asuransi Jiwasraya menggunakan tenaga ahli yang bekerja secara profesional dan independen, misalnya auditor eksternal dari KAP yang terdaftar di Bapepam.
 3. Asuransi Jiwasraya berusaha untuk menghindari benturan kepentingan dan memiliki peraturan tentang benturan kepentingan tersebut.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) telah tercapai, hal ini terlihat dari:

- a. Keterbukaan (*Transparency*)
Perusahaan secara terbuka menyediakan informasi (secara akurat dengan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan, yang mana

informasi tersebut dapat diakses oleh stakeholders dengan mudah.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan sudah diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan selalu berusaha untuk menjadikan perusahaan berkategori sehat serta memiliki nilai tambah bagi masyarakat sekitar perusahaan.

d. Kewajaran (*Fairness*)

Informasi diungkapkan dan dipublikasikan secara wajar kepada stakeholders, perusahaan juga membuat kebijakan untuk memproteksi perusahaan dari kesalahan-kesalahan yang biasa timbul dari dalam perusahaan.

e. Kemandirian (*Independency*)

Perusahaan menggunakan tenaga ahli yang bekerja secara profesional dan independen, dan memiliki peraturan tentang benturan kepentingan.

Saran

Berdasarkan penelitian atas penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. Asuransi Jiwasraya (persero) di Kota Palopo, maka peneliti mengajukan saran sebagai bahan pertimbangan yaitu agar PT. Asuransi Jiwasraya (persero) tetap menerapkan prinsip-prinsip GCG bahkan menyempurnakannya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat perusahaan.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat lebih mengembangkan penelitian yang telah

dilakukan ini, yaitu hasil dari penelitian ini hanya berasal dari satu perusahaan saja dengan fokus pada perusahaan asuransi yang termasuk BUMN dan tidak menyangkut perusahaan asuransi selain BUMN. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak perusahaan asuransi dan dengan berbagai model, baik BUMN maupun swasta.

Daftar Pustaka

- Ardianingsih, Arum. 2012. *Analisis Mekanisme Corporate Governance Pada Pemberian Opini Audit dengan Penjelasan Going Concern*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (Online) Vol 11, No 1 (http://portalgaruda.org/download_article), (diakses 25 Oktober 2013).
- Basrowi & Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Cahyaningsih & Venty. 2011. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung jawab Sosial*. Jurnal Siasat Bisnis (Online), Vol 15, No 2. (<http://fecon.uui.ac.id>), (diakses 20 Januari 2013).
- Febriyanti, Diah. 2010. *Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada PT.Bank X, Tbk)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Hery. 2010. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung : Alfabeta.
- <http://jhohandewangga.wordpress.com>. 27 Februari 2012. *Makalah Tentang Asuransi*. (diakses 31 Januari 2014).
- <http://www.jiwasraya.co.id>
- Jama'an. 2008. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada*

- Perusahaan Publik di BEJ*). Tesis Program Studi Magister Sains Akuntansi Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 *tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada BUMN*. Jakarta: Kementerian BUMN.
- Nuryanah. 2004. *Analisis Ketaatan Emiten terhadap Board Governance*. Studi Kasus Tahun 2002, *Simposium Nasional Akuntansi VII*, Desember, Hal 246-255.
- Oktafia, Yufenti. 2010. *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba*. (Online), (<http://ejournal.uin-malang.ac.id>), (diakses 25 Oktober 2013).
- Pasorong, Andrew Mikha. 2012. *Evaluasi Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Pada Lembaga Perbankan (Studi Empiris Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Busines*. Buku 1, edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2006. *Research Methods For Busines*. Buku 2, edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Sundayani, Lilir. 2013. *Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (GCG)*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
- Susiana. & Herawaty, A. 2007. *Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan*, *Simposium Nasional Akuntansi X*, Juli, Hal. 1-31.
- Tadikapury, Violetta Jingga. 2011. *Penerapan Good Corporate Governance*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Triyuwono, Iwan. 2013. *Makrifat Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Mengembangkan Disiplin Akuntansi*, *Simposium Nasional Akuntansi XVI*, September.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.